

# Pengaruh Payment Online System (POS) dan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) Terhadap Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang

Suci Ramadani <sup>1</sup>, Lili Syafitri <sup>2</sup>, Vhika Meiriasari <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi; Universitas Indo Global Mandiri; Indonesia; e-mail: [suciramadaniih@gmail.com](mailto:suciramadaniih@gmail.com)

<sup>2</sup> Akuntansi; Universitas Indo Global Mandiri; Indonesia; e-mail: [lilisyafitri6297@gmail.com](mailto:lilisyafitri6297@gmail.com)

<sup>3</sup> Akuntansi; Universitas Indo Global Mandiri; Indonesia; e-mail: [vhikams@uigm.ac.id](mailto:vhikams@uigm.ac.id)

\* Korespondensi: e-mail: [suciramadaniih@gmail.com](mailto:suciramadaniih@gmail.com)

Diterima: 15 September 2024; Review: 28 November 2024; Disetujui: 31 Desember 2024

Cara sitasi: Ramadani S., Syafitri L., Meiriasari V. 2024. Dampak Payment Online System (POS) dan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) Terhadap Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Jurnal Online Insan Akuntan. 9 [2]: 98 – 110

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Payment Online System dan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) terhadap kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah di kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data dikumpulkan berdasarkan data kuisioner dan studi kepustakaan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari 99 kuisioner yang diisi oleh wajib pajak di Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Data tersebut menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji heterokedastitas uji signifikansi simultan dan uji t dan uji koefisien determinasi melalui bantuan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Payment Online System (X1) dan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (X2) berpengaruh terhadap Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y).

**Kata kunci:** Sistem Pembayaran Online, Denda PBB, Pendapatan Asli Daerah

**Abstract:** This research aims to determine the effect of the Online Payment System and Urban Rural Land and Building Tax Fines (PBB P-2) on the contribution of local income revenue in the Bukit Kecil sub-district, Palembang City. The method used in this research is quantitative. Data was collected based on questionnaire data and literature studies from the Regional Revenue Agency of Palembang City. The data obtained in this research came from 99 questionnaires filled out by taxpayers in Bukit Kecil District, Palembang. The data uses a Likert scale. The data analysis techniques used in this research include multiple linear regression analysis using classic assumption tests in the form of normality tests, heteroscedasticity tests, simultaneous significance tests and t tests and coefficient of determination tests using SPSS software. The results of this research show that the variables Online Payment System (X1) and Land and Urban Building Tax Fines (X2) have an influence on the Contribution of Regional Original Income Revenue (Y).

**Keywords:** Online Payment System, PBB Fines, Original Regional Income

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memperoleh pendapatan melalui salah satu sumber pendapatan yaitu pajak. Berdasarkan sumber-sumber penerimaan negara yang paling

besar di dapatkan dari sektor pajak. Hal ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak sangat membantu pemerintah dalam memfasilitasi segala jenis pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Namun pada beberapa keadaan realisasi pajak masih jauh dari target. Wajib pajak masih tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hal ini membuat penerimaan pendapatan pajak baik dari pajak daerah maupun pajak pusat mengalami penurunan yang signifikan. Pajak merupakan iuran yang harus dibayar ke negara oleh masyarakat (bersifat memaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perpajakan yang berlaku (Daeli et al., 2016).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang ditetapkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peraturan pemerintah mengenai Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu hal yang dapat membangun hukum antar pemerintah dengan warga negara. Tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di beberapa wilayah di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Dalam hal ini pemerintah bahkan sudah memberikan fasilitas pembayaran pajak secara online yang sangat memudahkan para wajib pajak untuk membayar pajak secara teratur (Anggara Sari, 2013).

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibutuhkan peranan masyarakat. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan memengaruhi besar kecilnya penerimaan daerah yang tentunya berdampak pada dana yang digunakan bagi pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan sosial/masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan dengan tarif yang kecil memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi para wajib pajak. Tarif PBB yang rendah membuat beberapa wajib pajak merasa tidak perlu untuk membayar pajak yang mengakibatkan penerimaan pendapatan daerah di Indonesia terutama di Kota Palembang masih sangat rendah (Kusdiah Ningsih et al., 2021).

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Sistem pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Official Assessment system, sistem pemungutan tersebut dimana jumlah Pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus / aparat Pajak. Pada sistem pemungutan official assessment sistem ini wajib Pajak bersifat pasif. Sedangkan fiskus/ aparat bersifat aktif. Tanpa adanya kesadaran wajib Pajak untuk mengetahui besarnya jumlah pembayaran Pajaknya, maka akan mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib Pajak (Wijayanti et al., 2021).

(Undang - undang No 12 Tahun 1985) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjelaskan PBB merupakan pungutan pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan yang memeberikan keuntungan ekonomi bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dugunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertanmbangan. Pengertian ini tercantum pada (UU RI No 28 Tahun 2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki sifat sebagai pajak kebendaan atau bisa disebut pajak objektif. Hal itu mengandung arti bahwa besarnya pajak terutang akan tergantung pada luas dan kondisi dari objeknya. Kondisi dari subjek atau wajib pajak tidak memengaruhi besarnya pajak terutang.

Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan penegakan aturan juga diperlukan untuk mendorong wajib pajak beralih dari sistem pelaporan secara manual menjadi pelaporan pajak secara elektronik (Hertati, 2021). Pemerintah mulai melihat potensi adanya peningkatan apabila terciptanya pembayaran pajak secara online dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah. Pemerintah menyediakan fasilitas untuk memudahkan para wajib pajak PBB agar dapat membayar pajak secara rutin dengan melakukan pembayaran secara online. Pembayaran secara online dapat dilakukan menggunakan e-commerce atau juga dapat melalui mobile banking ataupun menggunakan e-commerce. Pembayaran secara online biasanya hanya dengan menginput nomor objek pajak lalu menginput tahun pajak yang ingin dibayarkan. Dan pemerintah khususnya kota Palembang telah menyediakan website bagi masyarakat yang ingin mengecek jumlah tagihan pajak melalui website [pbb.palembang.go.id/portlet/portlet.php](http://pbb.palembang.go.id/portlet/portlet.php). (Sainang, 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dugunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertanmbangan. Pengertian ini tercantum pada (UU RI No 28 Tahun 2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki sifat sebagai pajak kebendaan atau bisa disebut pajak objektif. Hal itu mengandung arti bahwa besarnya pajak terutang akan tergantung pada luas dan kondisi dari objeknya. Kondisi dari subjek atau wajib pajak tidak memengaruhi besarnya pajak terutang.

Denda pajak yang terhutang berdasarkan (UU RI No 29 Tahun 2009) bahwa pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2018-2022

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Persentase
2018	Rp 5.597.184.361,00	Rp 5.218.722.285,00	93%
2019	Rp 8.463.754.693,00	Rp 6.960.746.804,00	82 %
2020	Rp 12.435.546.074,00	Rp 8.609.320.578,00	69 %
2021	Rp 10.758.112.753,00	Rp 7.672.732.432,00	71%
2022	Rp 11.122.514.856,00	Rp 7.990.169.360,00	71%

Sumber: BAPENDA Kota Palembang (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak PBB Kota Palembang hanya mencapai target di tahun 2018 yaitu sebesar 93% dengan target pendapatan PBB sebesar 5.597.184.361,00 Namun mengalami penurunan realisasi sebesar Rp. 5.218.722.285,00 dimana terdapat penurunan 7 % dari target yang sudah ditentukan. Hingga sampai pada tahun 2019 sampai 2022 penerimaan PBB mengalami penurunan yang signifikan 18 %, 21% dan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 29 % yaitu dengan target penerimaan PBB Rp8.463.754.693,00, Rp12.435.546.074,00, Rp10.758.112.753,00 dan Rp11.122.514.856,00.

Tabel 2. Analisis Kontribusi Penerimaan PBB pada PAD Kota Palembang Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PAD	Presentanse Kontribusi	Kriteria
2020	229.251.907.196,00	1.032.720.967.939,99	22,20%	Sedang
2021	241.731.534.589,00	836.993.260.908,04	28,88 %	Sedang
2022	258.953.060.121,00	1.378.999.509.032,10	18,78%	Kurang

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Di tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 8,14% dari tahun sebelumnya menjadi 19,88% dan masih tetap dikategorikan “Kurang” dan di tahun 2021 terjadi peningkatan lagi sebesar 1,28% dari tahun sebelumnya menjadi 21,16% dan dapat dikategorikan “Sedang”. Di tahun 2022 terjadi peningkatan lagi sebesar 3,78% dari tahun sebelumnya menjadi 24,94% dan masih dikategorikan “Sedang”. Kemudian pada tahun 2022 merupakan persentase kontribusi terbesar yaitu 24,94% dan pada tahun 2019 merupakan persentase kontribusi terkecil yaitu 11,74%

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif sebagai sumber data yang menghasilkan data berupa sampling dari badan/instansi terkait yang berhubungan dengan topik penelitian. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono

(2019), adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional, serta sistematis.

Objek dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang taat dan tidak taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan terkait Pengaruh Payment Online System Dan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Kontribusi Penerimaan Pendapatan Daerah Di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekitar 7.406 wajib pajak yang merupakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki objek pajak yang berada di Kecamatan Bukit Kecil. Penentuan sampel yang akan digunakan dalam objek penelitian ini adalah menggunakan Rumus Slovin, yaitu pengambilan sampel dari populasi yang sesuai dengan kriteria penelitian dan pertimbangan tertentu.

Berikut adalah jumlah sampel yang diambil menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{7.406}{1 + 7.406(0,1)^2}$$

$$n = \frac{7,406}{75,06}$$

$$n = 98,66 \text{ (dibulatkan 99)}$$

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuisioner dari masing-masing variabel yang akan diuji. Uji validitas yang telah dilakukan penelitian ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Indikator	R hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,808	0,197	Valid
X1.2	0,705	0,197	Valid
X1.3	0,773	0,197	Valid
X1.4	0,657	0,197	Valid
X1.5	0,846	0,197	Valid
X1.6	0,739	0,197	Valid
X2.1	0,616	0,197	Valid
X2.2	0,802	0,197	Valid
X2.3	0,763	0,197	Valid
X2.4	0,673	0,197	Valid
X2.5	0,832	0,197	Valid
X2.6	0,673	0,197	Valid
Y.1	0,735	0,197	Valid
Y.2	0,786	0,197	Valid
Y.3	0,755	0,197	Valid

Y.4	0,718	0,197	Valid
Y.5	0,825	0,197	Valid
Y.6	0,598	0,197	Valid

Sumber: data diolah peneliti, 2024

Dari hasil pengujian validitas pada table diatas, kuesioner yang berisi dari 3 variabel ini ada 18 kuesioner yang telah diisi oleh 99 responden pada penelitian ini. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak valid, kita harus mencari tahu rtabelnya terlebih dahulu. Rumus dari rtabel adalah  $df = N - 2$  jadi  $99 - 2 = 97$ , sehingga  $r$  tabel = 0,197 Dari hasil perhitungan validitas pada table diatas, dapat dilihat bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel}$  ada 18 kuesioner yang dinyatakan valid, 18 kuesioner semua dinyatakan valid karena  $r_{hitung}$  lebih dari  $r_{tabel}$  yaitu 0,197.

Penelitian ini harus dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur konsisten atau tidak suatu kuesioner dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh tidaknya variabel X1 dan X2 pada variabel Y. Sebelum dilakukannya pengujian reliabilitas harus ada dasar pengambilan keputusan yaitu Cronbach's alpha sebesar 0,6. Variabel yang dianggap reliabel jika nilai variabel tersebut  $> 0,6$  jika lebih kecil maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena  $< 0,6$ . Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Payment Online System

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.851	6

Sumber: data diolah peneliti, 2024

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Payment Online System (X1) dapat dilihat bahwa Cronbach's Alpha dari 6 butir pertanyaan pada variabel ini lebih tinggi dari nilai dasar yaitu  $0,851 > 0,60$  hasil tersebut membuktikan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner variabel (X1) dinyatakan reliabel.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Denda PBB

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.824	6

Sumber: data diolah peneliti, 2024

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Denda PBB (X2) dapat dilihat bahwa Cronbach's Alpha dari 6 butir pertanyaan pada variabel ini lebih tinggi dari nilai dasar yaitu

0,824 > 0,60 hasil tersebut membuktikan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner variabel (X2) dinyatakan reliabel.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Pendapatan Asli Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.831	6

Sumber: data diolah peneliti, 2024

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dapat dilihat bahwa Cronbach's Alpha dari 6 butir pertanyaan pada variabel ini lebih tinggi dari nilai dasar yaitu  $0,831 > 0,60$  hasil tersebut membuktikan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner variabel (Y) dinyatakan reliabel.

Hasil dari penyebaran titik pada grafik Normal P-Plot Of Regression Standardized Residual digunakan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau sebaliknya yaitu tidak berdistribusi normal. Apabila penyebaran titik-titik menyebar pada garis lurus (diagonal) dan menjauh dari garis lurus (diagonal) sedikit menjauh maka data tidak berdistribusi normal.

Dari hasil olah data probability plot yang dilakukan dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar terhimpit disekitar garis diagonal, dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terdistribusi normal.

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Hasil uji multikolonieritas berdasarkan pada tolerance value dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi yang bebas multikolinieritas yaitu apabila nilai  $VIF < 10$  dan mempunyai tolerance value  $> 0,10$ . Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian multikolinieritas.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.		
1	(Constant)	13.943	2.663		5.235	<,001	
	POS	.201	.105	.202	1.911	.059	.768
	Denda PBB	.266	.098	.287	2.715	.008	.768

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai toleransi pada Payment Online System (X1) sebesar 0,768 Sanksi PBB (X2) sebesar 0,768. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independent memiliki nilai tolerance  $> 0,10$  yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen, sehingga dalam mode regresi ini baik.

Sedangkan nilai VIF pada Payment Online System (X1) sebesar 1,302, Denda PBB (X2) sebesar 1,302 menunjukkan dimana semua variabel independen memiliki nilai VIF  $< 10$  sehingga dalam mode regresi ini baik dan tidak terjadi multikolinieritas serta memenuhi syarat normalitas data.

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan pada model regresi untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikansi  $\geq 0,05$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, namun sebaliknya jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas. Solusi jika model menyalahi asumsi heteroskedastisitas adalah dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma atau dapat juga dilakukan dengan membagi semua variabel dengan variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Dari analisis data jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika terdapat pola yang jelas, maupun titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari scatterplot diatas dapat disimpulkan terdapat titik-titik yang membentuk pola yang teratur dan titik-titik pada scatterplot di atas menyebar secara acak di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu y, maka artinya menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. dari uji asumsi klasik diatas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal dan tidak terdapat multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. sehingga, memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi linier berganda agar dapat melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian ini menganalisis pengaruh antara melihat pengaruh Payment Online System dan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Berikut hasil persamaan regresi:



Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.943	2.663		5.235	<,001		
	POS	.201	.105	.202	1.911	.059	.768	1.302
	Denda PBB	.266	.098	.287	2.715	.008	.768	1.302

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: data diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil output SPSS 26 pada tabel diatas, maka persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 13.943 + 0.201 X_1 + 0.266 X_2 + e$$

Y = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>1</sub> = Payment Online System

X<sub>2</sub> = Denda PBB

Hasil dari analisis tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Besarnya nilai koefisien regresi Payment Online System mempunyai regresi dengan arah positif menyatakan bahwa setiap perubahan variabel PT akan berpotensi menaikkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol. Besarnya nilai koefisien regresi Denda PBB mempunyai regresi dengan arah positif menyatakan bahwa setiap perubahan variabel KWP akan berpotensi menaikkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak untuk digunakan sebagai model pengujian data dan hipotesis yang diajukan dengan kriteria jika sig < 0,05 maka model penelitian layak digunakan sebaliknya jika > 0,05 maka model penelitian tidak layak untuk digunakan. Berikut hasil penelitian uji f.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	169.911	2	84.956	12.075	<,001b
	Residual	675.442	96	7.036		
	Total	845.345	98			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Sanksi, POS

Sumber: data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka didapatkan hasil F hitung sebesar 9,158. Dengan menggunakan tingkat keyakinan  $95\% = 5\%$ ,  $df_1 = 2$  dan  $df_2 = 85$ , hasil diperoleh untuk f table sebesar 3,10 dengan begitu nilai f hitung  $9,158 > f \text{ table } 3,10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dapat digunakan untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Sedangkan jika dilihat dari nilai sig hitung adalah 0,001 yaitu  $< 0,05$  yang berarti hal ini menunjukkan bahwa variabel Payment Online System dan Sanksi PBB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016). Jika nilai Rsquare semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen akan semakin besar, dan berlaku sebaliknya.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.423a	.179	.161	2.672

a. Predictors: (Constant), Sanksi, POS

Sumber: data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, didapatkan nilai Adjusted R Square dengan nilai 0,161. Hal ini berarti kemampuan Payment Online System dan Denda PBB Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,1% sedangkan 83,9,1% dijelaskan oleh faktor lain yang berada diluar model dan tidak dapat terdeteksi dalam penelitian ini.

Menurut Ghozali (2016) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) dengan kriteria sebagai berikut:

Jika nilai signifikan  $> 0,05$  atau T hitung  $< T_{\text{tabel}}$  maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikan  $< 0,05$  atau T hitung  $> T_{\text{tabel}}$  maka hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji Statistik t

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	13.943	2.663		5.235	<,001
	POS	.201	.105	.202	1.911	.059
	Denda PBB	.266	.098	.287	2.715	.008

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan hasil uji statistic t menunjukkan hasil seagai berikut:

1. Hasil pengaruh Payment Online System terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan uji t dengan hasil yang diperoleh yaitu nilai t hitung = 1,911 < t table 1,984 dengan signifikan 0,104 ( $p < 0,05$ ). Dengan signifikan lebih besar dari 0,05 maka **Hipotesis 1 ditolak**.

2. Hasil Pengaruh Denda PBB terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan uji t dengan hasil yang diperoleh yaitu nilai t hitung = 2,715 > t table = 1,984 dengan signifikan 0,01 ( $p > 0,05$ ). Dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 maka **Hipotesis 2 diterima**.

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Payment Online System* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji statistik t dimana nilai t hitung = 1,641 < t table 1,988 dengan tingkat signifikansi di atas 0,05 yaitu 0,193 hal ini tidak sesuai dengan H1 yang menyatakan *Payment Online System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi PBB berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji statistik t dimana nilai t hitung 2,645 > t tabel 1,988 dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,001. Hal ini sesuai dengan H2 yang menyatakan bahwa Sanksi PBB berpengaruh terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.

Berdasarkan hasil Penelitian, *Payment Online System* dan Denda Pajak Bumi dan Bangunan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan melakukan uji F yang diketahui bahwa variabel bebas yaitu *Payment Online System* dan Denda Pajak Bumi dan Bangunan memiliki F hitung 9,158 > F

tabel 3,10 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Maka hipotesis satu (H3) diterima. Dengan demikian *Payment Online System* dan Denda PBB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara parsial *Payment Online System* Terhadap Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Hipotesis pertama tidak berpengaruh dengan nilai t-statistic yang tidak signifikan dan p-value yang lebih rendah dari ini menunjukkan bahwa *Payment Online System* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Denda PBB Terhadap Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Hipotesis Kedua diterima dengan nilai t-statistic yang signifikan dan p-value yang lebih tinggi dari ini menunjukkan bahwa Denda PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Penerapan Denda PBB berpengaruh terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan secara simultan *Payment Online System* dan Denda PBB memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai f-hitung yang lebih tinggi dibanding dengan f-tabel, dari ini menunjukkan bahwa *Payment Online System* dan Denda PBB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.

#### Referensi

- Anggraini, L. (2020). Analisis Payment Online System Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Daeli, F., Syafitri, L., Kristina, U., Akuntansi, J., Multi, S., & Palembang, D. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang). *STIMK GI MDP*, 1–14.
- Ghozali, I. (2018). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS “Edisi Sembilan Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59-70.
- Juliasih, L., Hermawan, Y., & Gunawan, A. (2022). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Garut. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah Volume*, 4(1).
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2020). Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Pendidikan*, 7(2), 124–133.
- Lira, B. P., & Amaliah, I. (2023). Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Secara Online (Kantor Uptd Pengelola Pendapatan Daerah Kota Sukabumi). *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3(2), 523–530.
- Ningsih, E., Eka Novianty, D., Naruliza, E., Kunci, K., & Bumi dan Bangunan, P. (2021). *Analisis Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang*. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Putri, A. N. I. A. (2023). Pengaruh pembayaran sistem online terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(7), 3123-3132.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap 22 kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (studi pada wajib pajak PBB-P2 di kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22-39.
- Sainang, S. (2021). Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan dan Kemudahan Pengguna Terhadap Minat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menggunakan Shopeepay. *Jurnal Riset Perpajakan*, 04(01), 129–140.
- Santoso, F., & Djati, K. (2021). Pengaruh Insentif, Sanksi, Pembayaran Online dan Pembinaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang). *JAST Journal of Accounting Science and Technology*, 2(2), 95–105.
- Undang - undang No 12 Tahun 1985. (1985). *Republik Indonesia*.
- UU RI No 28. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009*.
- Wijayanti, P. F., Nuraina, E., & Astuti, E. (2021). Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (E-PBB P2). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(2), 233–240. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i2.2816>